

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, dengan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, seperti aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan pribadi. Transportasi diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari infrastruktur, sarana, dan layanan yang memungkinkan pergerakan di seluruh wilayah, yang memungkinkan terjadinya mobilitas orang, pergerakan barang, dan akses ke seluruh wilayah. Hubungan antara transportasi dan manusia didasarkan pada lokasi, aktivitas, atau lokasi dengan jarak. Oleh karena itu, perkembangan transportasi menjadi hal yang sangat krusial (Wijanarko & Ridlo, 2019).

Dalam mengatasi perbedaan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan, dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi yang terdiri dari sarana (kendaraan) dan prasarana (jalan). Dengan adanya sistem ini, akan tersedia jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan (transportasi) dari satu tempat ke tempat lain. Lalu lintas kendaraan dan kegiatan transportasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang menghubungkan dua lokasi dari tata guna lahan yang mungkin sama atau berbeda. Memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain berarti memindahkan mereka dari satu tata guna lahan ke tata guna lahan yang lain, yang juga berarti dapat mengubah nilai (Wesli, 2016).

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan mobilitas dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik setiap daerah mendorong terjadinya interaksi antarwilayah, yang pada gilirannya meningkatkan

mobilitas dan memunculkan permasalahan yang semakin kompleks. Menurut Hardoko, R. (1987) dalam Inestasia (2018) menjelaskan bahwa salah satu dari tiga faktor pertumbuhan penduduk ialah mobilitas penduduk, juga dikenal sebagai migrasi nonpermanen, yang dapat meningkatkan atau mengurangi jumlah penduduk di suatu daerah. Mobilitas atau perpindahan penduduk di wilayah yang tidak menetap disebabkan oleh beberapa alasan dan tujuan. Salah satunya adalah pengadaan kendaraan umum, yang diikuti oleh penyediaan fasilitas untuk pembangunan wilayah yang memungkinkan transportasi antar wilayah menjadi lebih lancar, serta peningkatan infrastruktur jalan. Namun pada dasarnya, infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya transportasi dapat menghambat mobilitas tersebut. Oleh karena itu, frekuensi mobilitas yang dilakukan masyarakat akan berbeda-beda, terutama dalam hal mobilitas non-permanen.

Kota Medan merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia yang menduduki urutan ketiga. Berdasarkan data dari BPS Kota Medan tahun 2023, jumlah penduduk mencapai 2,47 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2023). Tingginya kepadatan penduduk ini dipengaruhi oleh intensitas aktivitas masyarakat di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Medan telah berkembang menjadi kota metropolitan, terlihat dari tingkat kepadatan penduduk, mobilitas masyarakat, serta perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan perbankan (Fahrezi1, 2021). Peningkatan jumlah penduduk akan memberikan pengaruh signifikan pada kapasitas transportasi untuk menangani kebutuhan masyarakat. Kondisi ini berimbas pada tingginya aktivitas perjalanan dan perpindahan penduduk, yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Dilansir dari

berita disrupsi.id, penelitian yang dilakukan oleh TomTom Traffic Index pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Medan adalah kota termacet di dunia yang menempati peringkat ke-15, bahkan lebih buruk dari Jakarta yang berada di peringkat ke-90. Studi ini menganalisis 500 kota di 62 negara dan didasarkan pada tingkat kemacetan dan waktu tempuh rata-rata (Wisely & Jaya, 2025).

Pertumbuhan jumlah kendaraan di Medan meningkat sekitar 11,49% setiap tahun. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Kota Medan mengalami tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Namun, seperti halnya banyak kota lainnya di Tanah Air, moda transportasi di Medan masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah total kendaraan bermotor di Kota Medan mencapai 288.378 unit, di mana 95% di antaranya terdiri dari mobil dan sepeda motor (Primatama & Raushanfikra, 2023). Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pembagian penggunaan moda transportasi di ruang jalan. Maka urgensi penyediaan transportasi publik di kota Medan menjadi hal yang penting dalam mengurangi kemacetan.

Transportasi umum, atau angkutan publik, menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan mobilitas antar wilayah dikarenakan tarifnya yang terjangkau, efisien, dan mudah dijangkau. Angkutan umum masal seperti kereta, angkutan kota, dan bus biasanya tersedia di kota-kota. Untuk memungkinkan penumpang menggunakan moda angkutan umum ini untuk mencapai tujuan mereka, seperti bisnis, sekolah, dan kegiatan lainnya, diperlukan infrastruktur pendukung. Ini dapat mencakup jaringan jalan raya dan lokasi

angkutan umum seperti stasiun, terminal, dan halte (Sulistyowati & Muazansyah, 2019).

Berdasarkan Pedoman Teknis Dinas Perhubungan dalam (Sulistyowati & Muazansyah, 2019) menjelaskan bahwa salah satu syarat pendukung terwujudnya sistem transportasi publik ialah perlunya prasarana berupa halte. Halte merupakan suatu tempat pemberhentian kendaraan angkutan penumpang umum untuk menurunkan atau menaikkan penumpang dan dilengkapi dengan bangunan khusus. Di sepanjang rute angkutan umum, Halte juga harus berada di tempat-tempat yang ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang agar perpindahan penumpang menjadi lebih mudah dan gangguan lalu lintas dapat diminimalkan. Karena di tempat-tempat ini, keberadaan calon penumpang berkontribusi secara signifikan terhadap gangguan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan. Dengan adanya halte, masyarakat dapat memperoleh pelayanan transportasi secara merata.

Meskipun halte memiliki fungsi utama sebagai tempat tunggu bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, pemanfaatannya di Kota Medan masih belum optimal. Banyak halte yang tidak digunakan sebagaimana mestinya dan sering disalahgunakan, yang dapat mengurangi efektivitas layanan transportasi publik (Kurniawan & Darajat, 2011). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaknyamanan dan ketidakamanan halte, fasilitas yang kurang memadai dan tidak berfungsi dengan baik, serta lokasi halte yang sulit dijangkau dari permukiman penduduk. Akibatnya, masyarakat harus menggunakan transportasi tambahan untuk mencapai halte, yang menyebabkan minat terhadap penggunaan halte semakin berkurang. Kurangnya aksesibilitas ini berdampak pada

rendahnya tingkat keterjangkauan transportasi publik bagi masyarakat, sehingga masih banyak warga yang lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum.

Sistem transportasi umum sebuah kota yang baik harus dapat menjangkau sebagian besar wilayah perkotaan dan memberikan kemudahan (aksesibilitas) bagi seluruh masyarakat untuk melakukan segala kegiatannya di semua lokasi yang berbeda. Menurut Nitama (2021) dalam Saputro & Kusuma (2023), aksesibilitas dapat diartikan sebagai ukuran kenyamanan atau kemudahan dalam mencapai suatu lokasi serta hubungan antar lokasi tersebut, yang menentukan apakah lokasi itu mudah atau sulit diakses. Sementara itu, Nugraheni et al. (2022) menambahkan bahwa aksesibilitas merujuk pada kemudahan dalam menjangkau suatu tempat, yang pada gilirannya dapat menciptakan konektivitas antar lokasi.

Menurut Dueker dan Peng (2008) dalam Riawan (2020) menjelaskan bahwa salah satu metode untuk mengevaluasi aksesibilitas suatu wilayah adalah dengan menggunakan pendekatan geografis melalui peta aksesibilitas. Sistem Informasi Geografis (SIG) menjadi alat yang efektif dalam pemetaan aksesibilitas, karena mampu mengolah data spasial dari peta digital dan informasi transportasi secara terintegrasi. Keunggulan analisis aksesibilitas berbasis SIG terletak pada kemampuannya untuk mengolah baik data spasial maupun tekstual yang berkaitan dengan objek tertentu, serta memetakan hasil analisis tersebut dengan jelas.

Kecamatan Medan Tembung dikenal sebagai salah satu kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 153.559 jiwa (BPS, 2024). Kepadatan ini didorong oleh pesatnya

perkembangan di sektor perumahan dan komersial yang terus mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Wilayah ini memiliki berbagai jenis pemukiman, dari perumahan modern hingga daerah perkotaan tradisional (Harefa et al., 2025). Kecamatan ini memiliki karakteristik permukiman yang beragam, mulai dari area padat penduduk hingga wilayah yang lebih terpencil. Meskipun terdapat berbagai moda transportasi publik, seperti angkutan kota dan bus, tidak semua permukiman memiliki akses yang mudah dan cepat ke fasilitas tersebut. Keterbatasan ini sering kali mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam menjangkau layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Selain itu, tantangan infrastruktur, seperti kondisi jalan yang buruk, kurangnya halte yang memadai, dan frekuensi layanan yang tidak konsisten, semakin memperburuk keterjangkauan transportasi publik di kawasan ini.

Apabila aksesibilitas halte sebagai sarana transportasi tidak memadai, maka akan menghalangi pergerakan dan mengurangi ketertarikan masyarakat terhadap transportasi umum, termasuk penduduk yang beraktivitas di kecamatan Medan Tembung. Dengan sistem transportasi publik yang baik, area permukiman dapat dihubungkan dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan berjudul “Analisis Aksesibilitas Fasilitas Halte terhadap Kawasan Permukiman di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan halte transportasi umum khususnya di Kecamatan Medan Tembung
2. Ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi akibat rendahnya aksesibilitas halte dibuktikan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat dan didominasi kendaraan pribadi.
3. Pemanfaatan halte masih belum optimal dan sering disalahgunakan, yang dapat mengurangi efektivitas layanan transportasi publik.
4. Infrastruktur yang tidak memadai seperti kondisi jalan yang buruk, kurangnya halte yang memadai, dan frekuensi layanan transportasi publik yang tidak konsisten, yang menghambat mobilitas masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan untuk mencegah adanya penyimpangan atau perluasan dari pokok permasalahan, sehingga penelitian dapat lebih terfokus dan memudahkan dalam pembahasan. Dengan demikian, tujuan penelitian dapat tercapai dengan lebih efektif. Berikut adalah beberapa batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini difokuskan pada kesesuaian pola distribusi fasilitas halte terhadap pola sebaran pemukiman di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan

2. Penelitian ini juga akan menitikberatkan pada ketersediaan, distribusi, serta keterjangkauan halte terhadap kawasan permukiman berdasarkan standar aksesibilitas transportasi publik di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian pola distribusi fasilitas halte terhadap pola sebaran permukiman di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan?
2. Bagaimana ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas halte terhadap kawasan permukiman di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian pola distribusi fasilitas halte terhadap pola sebaran permukiman di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.
2. Mengetahui ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas halte terhadap kawasan permukiman di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu geografi, khususnya dalam bidang geografi transportasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi penelitian sejenis, sehingga dapat menciptakan kesinambungan dalam kajian di bidang tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan, diharapkan dapat memberikan data empiris mengenai kondisi aksesibilitas halte di Kecamatan Medan Tembung, yang berguna dalam perencanaan transportasi berbasis data. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memahami pola persebaran halte dan tingkat keterjangkauannya terhadap permukiman. Dengan adanya data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan peningkatan aksesibilitas halte.

b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas halte serta dapat mendorong peningkatan pemanfaatan transportasi umum, yang berdampak pada pengurangan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan transportasi umum, tingkat kemacetan di Medan dapat ditekan, sehingga

mobilitas menjadi lebih lancar dan efisien.

- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran kritis, menganalisis data secara sistematis, dan menyusun rekomendasi berbasis ilmiah, yang berguna dalam dunia akademik maupun profesional, khususnya di bidang perencanaan wilayah dan transportasi.



THE
Character Building
UNIVERSITY